

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LISTRIK ATAS
PEMUTUSAN KWH METER SECARA SEPIHAK OLEH PT. PLN
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Putusan No 244/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Pdg)**

ABSTRAK

Oleh :

Danindra Qifaheza Alzifar

E1B019016

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Penelitian ini dilakukan terhadap Putusan Nomor 244/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Pdg mengenai tindakan PT.PLN (PERSERO) sebagai pelaku usaha yang melakukan tindakan pemutusan Kwh meter secara sepihak kepada konsumennya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis data normatif kualitatif dan disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa konsumen belum mendapatkan perlindungan hukum atas hak nya yang diatur dalam Pasal 4 huruf c, g, dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dikarenakan pelaku usaha tidak mengganti kerugian terhadap konsumen baik formil maupun imateril serta keberatan dari pihak pelaku usaha dikabulkan maka pihak konsumen adalah sebagai pihak yang dikalahkan yang akibat hukum nya pihak konsumen diharuskan membayar kerugian yang dialami oleh pihak Pelaku Usaha. Putusan PN Padang tersebut menunjukkan hak konsumen masih belum terpenuhi seutuhnya

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Listrik, Hak Konsumen

**LEGAL PROTECTION OF ELECTRICITY CONSUMERS FOR UNIDATED
DISCONNECT OF KWH METER BY PT. PLN BASED ON LAW**

**NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING
CONSUMER PROTECTION**

(Juridical Review of Decision Number 244/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Pdg)

ABSTRACT

By:

Danindra Qifaheza

E1B019016

Consumer protection is any effort that ensures legal certainty to provide protection to consumers. This research was conducted on Decision Number 244/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Pdg regarding the actions of PT. PLN (PERSERO) as a business actor who carried out the act of unilaterally disconnecting Kwh meters to its consumers.

The approach method used in this research is Normative Juridical with analytical descriptive research specifications. The data sources used in this research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data obtained will be analyzed using qualitative normative data analysis methods and presented in the form of narrative text which is arranged systematically, logically and rationally.

Based on the results of the research conducted, it was found that consumers have not received legal protection for their rights as regulated in Article 4 letters c, g, and h of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, because business actors do not replace losses to consumers, both formal and immaterial, and if approval from the business actor is granted, the consumer is the party affected by the law, the consumer is required to pay for the losses experienced by the business actor. The Padang District Court's decision shows that consumer rights are still not fully fulfilled.

Keywords: Responsibility, Business Actors, Electricity, Consumer Rights